

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Darus Badruzaman, Mariam, dkk, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hil-Co.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Johnny, Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kansil, C.S.T, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 2016, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1985, *Azas- Azas Hukum Perjanjian*, PT Bale Bandung, Bandung.

- Satrio, J.S. 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, R, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, National Legal Reform Program, Jakarta.
- Soenandar, Taryana, 2006, *Prinsip-prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Sukabumi.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Jakarta.
- Subekti, R., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Cet.29, PT Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Aneka Perjanjian Cet VI*, Alumni, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2016, *BUMN ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarif, Amiroeddin, 1997, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata, Jilid I. Cet. III, Rajawali, Jakarta.

## **B. Artikel Jurnal**

- Anisah, Siti, “Doktrin Keadaan Memaksa, Pengaturan, dan Perkembangannya”. *Jurnal Hukum Bisnis*”, Volume 29, No. 2, Tahun 2010.

Imron, Ali, “Fungsi Keseimbangan Asas Itikad Baik Dalam Perubahan Keadaan pada Pelaksana Perjanjian”, *Jurnal Cakwarala Hukum*. Vol. 18 No. 1, Juni 2013.

Lestari, Esta, “Tinjauan Kritis Atas Model Pembiayaan dan Penjaminan Dalam KPS Kelistrikan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Volume 24, No. 1 Tahun 2016.

Ngutra, Theresia, “Hukum dan Sumber-sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Volume XI No. 2, Oktober 2016.

Sukwanto, Bakti, dkk, 2008, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Pertamina Melawan Karaha Bodas Company LLC)*, Jurnal Mercatoria Volume 1 No. 1 Tahun 2008,

### C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Adiwibowo, Yustisia, 2008, *Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Negeri dan Luar Negeri: Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Dwiputri Irsan, Anggie, 2011, *Analisis Yuripis Permohonan Ganti Rugi Terhadap Joint Operation Contract (JOC) yang ditangguhkan oleh Pemerintah Dalam Kasus Antara Karaha Bodas Company LLC dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Kristiyani, Rita, 2014, *Analisis Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Listrik di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Latifah Rosa, Mir’atul, 2013, *Perubahan Regulasi Sebagai Keadaan Memaksa Terhadap Perjanjian: Studi Kasus Pemutusan Perjanjian Karena Perubahan Regulasi (Putusan No. 04/PDT.G/2004/PN.BTG)*, Skripsi, Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

M. Praniti Putri, Birgitta Melinda Hindarto, dan Jefferson Franklin W, 2016, *Tinjauan Ilmiah terhadap Overmacht dan Resiko serta Analisis Putusan Pengadilan Nomor 273/PDT.G/2010/PN JKT TIM*, Tugas Akhir, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Jakarta.

Nizammudin, 2003, *Aspek Hukum Kontrak Yang Mengandung Klausula Take of Pay Menurut Hukum Perjanjian Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Power Purchase Agreement Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan PT Paiton Energy Company*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Setiawan, Heru, 2011, *Implikasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi, Depok.

Susanti, Lenggang Dwi, 2009, *Tinjauan Yuridis Asas Final dan Binding dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Dalam Sengketa Pertamina dan Karaha Bodas Company*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wagian, Diangsa, 2006, *Penggunaan Syarat Ketentuan Umum Sebagai Dasar Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus PT Pertamina vs Karaha Bodas Company)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### **D. Pidato/Makalah**

Nasution, Chairuddin Syah, 2013, *Distribusi Risiko Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur*, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Siti Ismijati Jenie, 2007, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 10 September 2007, Yogyakarta.

Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan. 2019. *Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017 – 2021*, Di akses tanggal 11 April 2019.

#### **E. Internet**

Muhammad Yasin, *Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama 'Yurisprudensi'*, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ad95871d1a/bahasa->

[hukum--sumber-hukum-formal-bernama-yurisprudensi](#), Hukum  
Online, 7 Februari 2018, di akses tanggal 16 April 2019.

Geo Dipa Batal Garap PLTP Sarulla, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-619063/geo-dipa-batal-garap-pltp-sarulla>, di akses tanggal 16 Maret 2019.

The Overseas Private Investment Corporation (OPIC), United States Agency International Development, United States Agency Trade and Development, *10 Important Features to Include or Consider for a Bankable PPA*,  
<https://www.opic.gov/sites/default/files/files/10%20Elements%20of%20a%20Bankable%20PPA.pdf>, di akses tanggal 13 April 2019.

PT PLN (Persero), Divisi IPP,  
<https://www.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/Buku-IPP.pdf>, diakses tanggal 7 Maret 2019.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Acuan Alokasi Risiko Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia  
<http://www.iigf.co.id/media/kcfinder/docs/risk-allocation-guideline-ind.pdf>, diakses tanggal 25 Juni 2019.

Riki Perdana Raya Waruwu, Penerapan Asas Fiksi dalam Peraturan Mahkamah Agung, (*ignorantia jurist non excusat*).  
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24), di akses bulan Juli 2019.

## **F. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Air dan Mineral Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Air dan Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Air dan Mineral Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017.

#### **G. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3389K/PDT/1984 dalam perkara RP Adianto Notonindito melawan PT Tirta Sartika yang dikenal dengan “*Charter Partij Kapal – Demmorage- Force Majeure*”.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 24K/Sip/1958 dalam perkara Super Radio Company NV melawan Oey Tjoeng Tjoeng.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 tentang pengujian Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan No. 04/PDT.G/2004/PN. BTG) antara Pemerintah Kabupaten Batang dan CV Usaha Putra Indonesia.

## H. Lainnya

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tertanggal 5 September 1963 perihal Gagasan Menanggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-undang

Taufiq El Rahman, *Wawancara sebagai Narasumber Terkait Penulisan Tesis berjudul Perubahan Regulasi sebagai Keadaan Memaksa pada Perjanjian Jual Beli*, Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta Fakultas Hukum, tanggal 12 April 2019.

Ari Suherman, Evaluasi Sidang Tesis berjudul “ Penanggungungan Risiko oleh Badan Usaha Milik Negara terkait Perubahan Regulasi Sebagai Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Jual Beli Listrik”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Juli 2019.

Baker Mckenzie, *International Independent Power Producer and Power Purchase Agreement Benchmark Prepared for PT PLN (Persero)*, March, 24th 2017.